



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tentang kajian pustaka, yang terbagi menjadi 4 bagian pertama landasan teoritis, akan membahas teori serta konsep yang mendasari, memperkuat dan mendukung topik penelitian ini yaitu “Pengaruh Komponen *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan”. Setelah itu bagian selanjutnya penelitian terdahulu, akan membahas hasil dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan topik yang diambil oleh penulis.

Bagian selanjutnya kerangka pemikiran, kerangka pemikiran akan membahas mengenai hubungan antar variable kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Terakhir hipotesis, akan membahas mengenai penjelasan yang sudah dibahas pada akhir bagian bab dan penulis akan menarik kesimpulan sementara dari masalah yang sedang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. *Agency Theory* (Teori Agensi)

Dasar untuk membahas *corporate governance* adalah teori agensi. *Agency theory* pertama dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) Teori keagenan berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan atau organisasi. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku mementingkan dirinya yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan principal. Oleh sebab itu principal akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen agar supaya menahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak principal (Sari, Hamdi, dan Karimi

© 2022)

Eisenhardt (1989) membuat tiga asumsi tentang sifat dasar manusia. Hal-hal tersebut adalah: (1) masyarakat pada umumnya bersifat egois atau mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (*Bounded Rationality*), (3) Masyarakat selalu menghindari risiko (*Risk Averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Menurut Scott 2015 terdapat dua jenis asimetri informasi. Yaitu sebagai berikut.

- 1) *Adverse selection*, artinya manajemen dan orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan investor luar. Selain itu, fakta-fakta yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham tidak diungkapkan kepada pemegang saham.
- 2) *Moral hazard* yaitu kegiatan yang dilakukan manajemen tidak cukup diketahui oleh pemegang saham dan kreditor. Oleh karena itu, manajer dapat mengambil Tindakan yang melanggar kontrak, tanpa sepengetahuan pemegang saham, dan mungkin secara etika atau normatif tidak layak dilakukan. Adanya asimetri informasi menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen, sehingga memungkinkan prinsipal dan agen berusaha mengeksploitasi pihak lain demi keuntungannya sendiri.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan

manajemen, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelolaan dimana adanya tata kelola yang baik ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi masalah keagenan yang terdapat diperusahaan (Oktaviani, Diana, dan Afifudin 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

a. Latar belakang *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance atau yang biasa dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik, muncul tidak hanya karena kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun juga seiring dengan semakin maraknya skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Di masa lalu, tujuan utama bisnis adalah mencapai keuntungan ekonomi yang maksimal tanpa mempertimbangkan faktor lain. Namun, di era globalisasi saat ini, hanya perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat memenangkan persaingan. GCG sangat penting untuk membangun posisi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Untuk menjadi perusahaan kelas dunia perlu dibangun struktur dan sistem perusahaan yang kuat. Peningkatan nilai saham, praktik bisnis yang sehat, perhatian perusahaan terhadap pelanggan, produk berkualitas tinggi, hak buruh dan standar upah, masalah lingkungan hidup dan hak asasi manusia harus mendapat perhatian manajemen. Rephrase Itu bagian dari lingkungan perusahaan. Tuntutan dan kendali dari berbagai pemangku kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

iniilah yang mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b Pengertian *Good Corporate Governance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1) Menurut Komite (Fitranita, Kamaludin, & Midiastuty, 2017) Cadbury (Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. dan Cadbury 1992)

Tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Dewan direksi adalah bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mereka. Itu Peran pemegang saham dalam tata kelola adalah menunjuk direktur dan auditor dan untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa a struktur tata kelola yang tepat sudah tersedia. Itu tanggung jawab dewan termasuk pengaturan perusahaan tujuan strategis, menyediakan kepemimpinan untuk mewujudkannya efeknya, mengawasi pengelolaan bisnis dan melaporkan kepada pemegang saham mengenai pengelolaannya. Dewan tindakannya tunduk pada undang-undang, peraturan dan pemegang saham dalam rapat umum.

2) Menurut *Forum Of Corporate Governance In Indonesia* (2001) dalam (Fitranita, Kamaludin, & Midiastuty, 2017)

Mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam usaha mencapai tujuan corporate governance diperlukan mekanisme yang merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk mempengaruhi persyaratan tertentu.

3) Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*)

Perusahaan dioperasikan dan dikendalikan yang melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan lainnya pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang melaluinya tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai perusahaan ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya lebih banyak efisien.

4) Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (PUGKI 2021:1)

Governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Prinsip Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Manossoh (2016:23), prinsip dasar *corporate governance* adalah sebagai berikut :

(1) Transparensi (*transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini meliputi penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham, dan auditor.

(3) Responsibilitas (*responsibility*)

Merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

(4) Independensi (*independency*)

Independensi merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

kondisi keuangan, peluang kerja, dan tata kelola perusahaan yang baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Kewajaran (*fairness*)

Fairness merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*). Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antar pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut (Dwiridotjahjono 2009), terdapat beberapa manfaat dari penerapan konsep *corporate governance*, sebagai berikut:

(1) Mengurangi Biaya Agensi (*Agency Cost*)

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*), atau biaya yang timbul yang diakibatkan oleh pemberian kendali kepada manajemen, seperti biaya yang timbul karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi.

(2) Mengurangi Biaya Modal (*Cost Of Capital*)

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, perusahaan bisa mengurangi biaya modal (*cost of capital*). Biaya modal adalah biaya yang harus ditanggung setiap kali perusahaan meminta pinjaman kepada kreditur, Ini adalah manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dan akan memberikan manfaat yang positif untuk kreditur.

(3) Proses Pengambilan Keputusan Yang Baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, akan meningkatkan cara pengambilan keputusan, menghasilkan keputusan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan budaya kerja yang lebih positif.

(4) Menghindari Adanya Kecurangan

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, akan memungkinkan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan penyalahgunaan wewenang direksi dalam pengelolaan perusahaan.

(5) Meningkatkan Nilai Perusahaan Di Mata Investor

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, kepercayaan investor akan meningkat terhadap manajemen perusahaan tempat mereka berinvestasi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

(6) Bagi Para Pemegang Saham dan Negara

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, Seperti yang telah disebutkan pada poin 1, yaitu otomatis dapat menaikkan harga saham yang mereka investasikan serta menaikkan nilai dividen yang mereka terima. Kemudian manfaat untuk negara adalah akan meningkatkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga negara akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pajak yang diperoleh.

(7) Memotivasi Kinerja Karyawan

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, Motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan meningkat, dikarenakan hal tersebut sebagai hasil dari karyawan yang posisinya akan ditugaskan pada salah satu *stakhoder* yang seharusnya dikelola



secara baik oleh pihak perusahaan, sehingga produktivitas dan juga kinerja akan meningkat dan akan berdampak baik bagi perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(8) Meningkatkan Kepercayaan *Stakeholder*

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, para *stakeholder* pun akan semakin percaya terhadap perusahaan. Maka perusahaan akan mendapatkan *feedback* yang baik serta nama baik perusahaan akan naik.

(9) Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Dengan menerapkan konsep *corporate governance*, kualitas laporan keuangan yang disajikan akan meningkat. Dikarenakan para manajer tidak berani untuk melakukan praktik manajemen laba, dengan cara memanipulasi data yang ada dan mereka akan mematuhi peraturan serta kewajiban yang ada.

e. **Komponen *Corporate Governance***

Mekanisme mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam penelitian ini, komponen *good corporate governance* akan di proksikan dengan variable kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

(1) **Kepemilikan Manajerial**

Berdasarkan teori (Jensen Dan Meckling. 1976) menyebutkan bahwa pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan tersebut akan meningkat seiring dengan keinginan pihak para manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk



memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan. Menurut (Dewi dan Abundanti 2019), kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana seorang manajer bertindak sebagai pemilik perusahaan. Pada umumnya tata kelola sebuah perusahaan biasanya diurus oleh *agent* (manajer perusahaan) untuk mengelola dan mengurus kepentingan perusahaan, yang biasanya dipekerjakan oleh pihak *principal* (pemegang saham perusahaan). Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajemen untuk ikut serta dalam kepemilikan saham, sehingga ada kedudukan yang setara antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial sangat membantu jika manajer tertarik untuk turut serta ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Semakin besar saham kepemilikan manajerial, semakin proaktif manajemen bekerja untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan, hal ini berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan (Marsinah 2021).

Dengan adanya kesetaraan yang sama antara pihak *principal* (pemegang saham perusahaan) dan *agent* (manajer perusahaan). Hal tersebut dapat diatasi apabila seorang manajer mempunyai kepemilikan saham didalam sebuah perusahaan. Dalam penelitiannya (Marsinah 2021), berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan memunculkan sebuah hipotesis yang menarik, bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga masalah keagenan yang terjadi akan hilang dan diminimalisir jika seorang manajer merangkap sebagai pemilik/pengelola.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan (Krisnando, 2017)

Dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengatasi sifat manajer yang suka mengambil kesempatan, dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh investor institusional. Sehingga permasalahan keagenan yang terjadi dapat diselesaikan.

(3) Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pihak manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Fungsi monitoring yang dilakukan dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah dan proporsi dewan komisaris.

Dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 pasal 12, diatur mengenai fungsi Dewan Komisaris, antara lain :

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar.
- b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- c) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- d) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- e) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP.
- f) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri.
- g) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- h) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
- i) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- j) Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Menurut Peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 315/BEJ/06/2000 Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimum 30% dari jumlah anggota komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- b) Tidak memiliki hubungan dengan direkur dan atau komisaris lainnya dalam perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- d) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e) Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran dari dewan komisaris dalam perusahaan difokuskan untuk mengawasi kebijakan dewan direksi. Dewan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris bertanggung jawab terhadap mengawasi kualitas informasi suatu laporan keuangan. Hal tersebut sangatlah penting dikarenakan manajemen dapat melakukan praktik manajemen laba yang akan berdampak pada kurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan. Solusi untuk masalah tersebut dewan komisaris diberi akses untuk mengetahui informasi perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(4) Komite Audit

Menurut Suaryana (2005) “Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.”

Syofyan (2021:31) mengungkapkan bahwa tujuan komite audit sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris adalah memeriksa proses pelaporan keuangan (*financial statement*), pengendalian intern (*internal control*), proses audit (*audit process*), dan proses operasi perusahaan dan tingkat kepatuhan (*compliance*) aparat perusahaan terhadap hukum, peraturan yang berlaku dan aturan main lainnya.

3. Kinerja Keuangan

a. Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Surifah (2002:35) dalam Rahayu (2020:6) menyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan.



Menurut Callahan (2007) Rahayu (2020:6) menjelaskan bahwa kinerja keuangan

adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang dinyatakan dengan nilai uang dan biasanya digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penerimaan dan laba merupakan contoh ukuran dari kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan Callahan ini didukung pula oleh website-nya yang menyebutkan bahwa term kinerja perusahaan yang sering dipergunakan menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu dan biasanya bisa didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, baik dari laporan neraca, laba rugi maupun arus kas.

Menurut Oktaviani dkk (2020) Kinerja perusahaan adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan cara yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk memenuhi kewajibannya terhadap para investor dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan cara melihat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) karena dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang diperoleh investor atas investasinya. Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan *good corporate governance* untuk menggunakan *asset* dengan efisien dan optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi asset. Semakin tinggi ROA perusahaan, semakin baik. Beberapa perusahaan menekankan net margin yang tinggi untuk meningkatkan ROA mereka (Tertius dan Christiawan 2015).

Jenis jenis rasio ada 4 yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Menurut Seto dkk (2022:44) rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan periode kurang dari satu tahun.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang secara keseluruhan baik itu hutang jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva dan modal yang dimiliki perusahaan Seto dkk (2022:47).

Rasio aktivitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan secara efektif Seto dkk (2022:48).

Menurut Seto dkk (2022:50) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, rasio ini juga digunakan sebagai ukuran bagi para investor untuk memberikan informasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengambilan keputusan berinvestasi. Secara umum ada empat jenis rasio utama yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan diuraikan berikut ini :

- 1) *Gross Profit Margin* (GPM) atau biasa disebut margin laba kotor merupakan cara yang digunakan dalam penentuan harga pokok penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang diperoleh dari jumlah penjualan perusahaan. GPM dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

- 2) *Net Profit Margin* Net profit margin (margin laba bersih) merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin laba bersih merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan volume penjualan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$NPM = \frac{\text{Laba Setelah Bunga Dan Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

- 3) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- 4) *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Berisikan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berikut disajikan table

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maria Fransisca Widyati (2013)	Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan	Dewan direksi, komisaris independent, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
2.	Dominikus Widagdo Dan Anis Chairi (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat komite

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3.	Arsanto Teguh Utomo Dan Rahardjo (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan</i>	Kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit	Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan.
4.	Faisal Rizky Wardana Dan Komar Darya (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan</i>	Komite audit, komisaris independen kepemilikan manajerial	Komite audit dan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Oktaviani, Diana dan Afifudin (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018</i>	Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit	Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
6.	Suridar Sanah, Mukhzarudfa dan Tona Aurora L	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan</i>	Struktur kepemilikan, struktur pengelolaan, transparansi, kinerja keuangan	struktur pengelolaan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan. struktur pengelolaan berpengaruh secara langsung terhadap transparansi perusahaan, struktur kepemilikan tidak berpengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019		secara langsung terhadap kinerja perusahaan, struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap transparansi perusahaan, Transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pada perusahaan, Struktur pengelolaan tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui transparansi pada perusahaan, Struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui transparansi pada perusahaan.
7.	Ayu Yulia Sari, Mukhlizul Hamdi, Kasman Karimi (2022)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan	Dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kinerja lingkungan	Hanya komisaris independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dewan direksi, komite audit dan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
8.	Viola Febriana (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap	Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial	Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja



9. I Gusti Agung Ayu Pradnya Paramitha, I Ketut Suryanawa (2023) 10. Lutfi Afriyanti Amaliyah Dan Nur Handayani (2023)	Kinerja Keuangan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	keuangan. Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
				ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan. ukuran dewan direksi, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.
				<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang di proksikan dengan <i>Return on Assets (ROA)</i>. <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang di proksikan dengan <i>Return on Assets (ROA)</i>.

C. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ukuran



komite audit. Variabel dependen yang diangkat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut,

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Investor manajerial terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan akan membantu meningkatkan pengawasan dan bertindak secara hati-hati terhadap perusahaan, karena apabila manager melakukan kesalahan maka manager jugalah yang harus menanggung konsekuensinya. Hal ini menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial akan mendorong manager untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial, akan membuat manager bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik perusahaan dimana hal ini akan membuat manager lebih berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga imbal hasil yang didapat akan lebih tinggi. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan, akan membuat manager termotivasi dalam memajukan perusahaannya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan juga pemegang saham lainnya (Brata & Sari, 2019).

Hasil penelitian dari Wardana & Darya (2020) dan Gunawan & Wijaya (2020) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.



2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Pada umumnya investor institusional seperti lembaga pemerintah atau bank akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham institusi mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau tidak mendukung keputusan yang dibuat manajemen. Selain itu, struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu mengoptimalkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif, karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan dan secara otomatis kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Sesuai dengan teori agensi, pengawasan oleh pihak institusi dapat menjadi sistem monitoring yang penting karena pemegang saham institusional memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memonitor manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Penelitian Lestari & Yulianawati (2016), Utomo & Rahardjo (2014), Maria Fransisca Widyati (2013) dan Gunawan & Wijaya (2020) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Kehadiran dewan komisaris independen atau anggota komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih efektif kepada investor. Komisaris independen dapat memantau perusahaan dengan lebih efektif karena kepentingan mereka tidak terikat pada manajemen perusahaan, sehingga meminimalkan



adanya aktivitas tata kelola perusahaan yang kotor, tidak jelas, dan mementingkan diri sendiri. Peningkatan pengawasan akan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan berdampak pada kinerja keuangan yang meningkat. Berdasarkan teori keagenan dengan adanya dewan komisaris independen dapat mengurangi konflik *agency* dan *principal*. Dikarenakan pihak dewan komisaris independen menjadi penghubung antara pihak internal dan eksternal.

Berdasarkan temuan Oktaviani, Diana, Afifudin (2020), Leani, Pratiwi, Utami (2022), Maria Fransisca Widyati (2013) dan Sari, Hamdi, Karimi (2022) menyatakan bahwa komite independen mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit dinilai lebih efektif dalam mengawasi pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan komite audit bertanggung jawab langsung kepada direksi dalam mendukung dan memperkuat fungsi dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas pelaporan keuangan. Proses pelaporan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola di perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit maka mengurangi *agency conflict*, kinerja perusahaan akan meningkat dan menjalankan misinya akan lebih terpantau dan terkendali.

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Febriana dan Sri (2022), Shanti (2020) dan Rahmatika, Widarjo, Payamta (2019) yang berpendapat bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

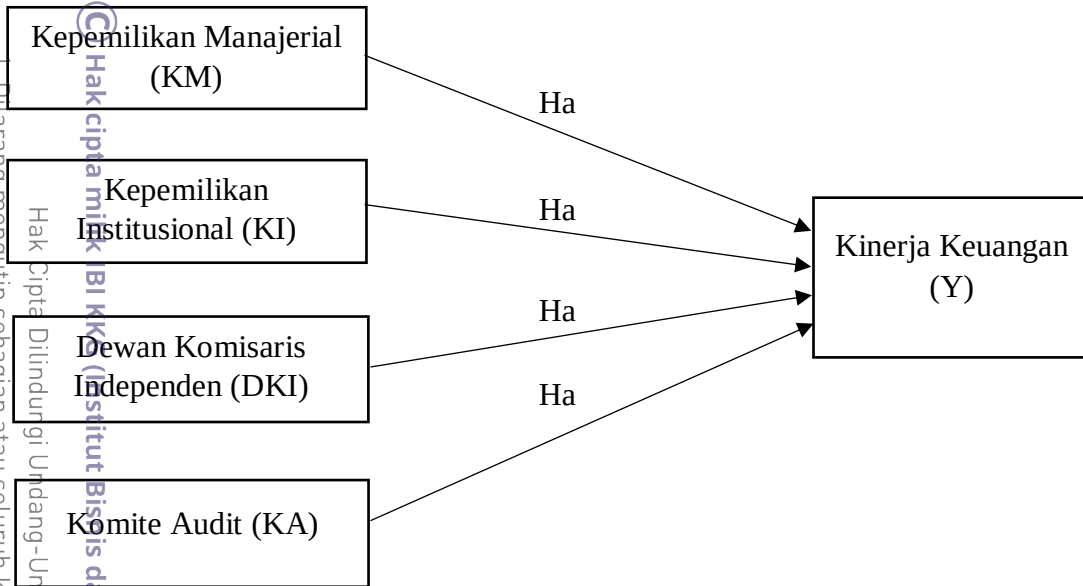
Kerangka pemikiran disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka dituliskan hipotesis.

Ha₁ Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Ha₂ Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Ha₃ Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Ha₄ Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.